

Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional

Peni Hanggarini
M. Adnan Madjid
Anak Agung Banyu Perwita
Surya Wiranto
Universitas Pertahanan

Abstract

This paper discusses how pillars in Indonesia's vision of Global Maritime Fulcrum (GMF) are interrelated, particularly maritime culture and maritime diplomacy. These two pillars need to be implemented as an entity concept. Previous literatures have mainly discussed how each of the pillars contribute to the realization of GMF vision. Based on the perspectives of International Relations theory, this paper explains how maritime culture can influence the formulation of strategy and implementation of Indonesia's maritime diplomacy. The authors argue that the pillars of maritime culture and maritime diplomacy are reflection of the national interests supporting the GMF vision. Additionally, the embedded maritime culture in Indonesian society can have positive implications for the inputs, processes, outputs, and outcomes of maritime diplomacy. If maritime culture can be managed, it would serve as an instrument of soft power, it would construct the national identity and it would drive the creation of regional security governance, maritime norms and regime that could serve as facilitating factors for the achievement of national interests through Indonesia's maritime diplomacy. The pillar of maritime culture is the root of maritime diplomacy for achieving national interests.

Keywords: *maritime culture; maritime diplomacy; Global Maritime Fulcrum (GMF); Indonesia*

Abstrak

Tulisan ini membahas bagaimana pilar-pilar dalam visi Poros Maritim Dunia (PMD) saling terkait, terutama budaya maritim dengan diplomasi maritim. Kedua pilar ini perlu diwujudkan sebagai suatu konsep kesatuan. Penelitian terdahulu telah membahas bagaimana setiap pilar memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi PMD. Berdasarkan perspektif teori Hubungan Internasional, tulisan ini menguraikan bagaimana budaya maritim dapat mempengaruhi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia. Penulis beranggapan bahwa pilar budaya maritim dan diplomasi maritim sama-sama merupakan refleksi dari kepentingan nasional yang dapat mendukung visi PMD. Selain itu, melekatnya budaya maritim pada masyarakat Indonesia dapat memberikan implikasi positif bagi input, proses, output dan outcome diplomasi maritim. Apabila dikelola dengan terarah, budaya maritim dapat dipandang sebagai instrumen soft power, pembentuk identitas nasional dan pendorong norma tata kelola keamanan kawasan yang menjadi facilitating factor bagi pencapaian kepentingan nasional melalui diplomasi maritim Indonesia. Pilar budaya maritim merupakan akar bagi diplomasi maritim untuk mencapai kepentingan nasional.

Kata-kata kunci: *budaya maritim; diplomasi maritim; Poros Maritim Dunia (PMD); Indonesia*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekuatan maritim yang kuat. Dengan demikian, keberadaan strategi atau visi yang mengupayakan pengelolaan kekuatan maritim merupakan hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh Indonesia. Visi Poros Maritim Dunia (PMD) yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat pemilihan Calon Presiden 2014 dan pada pertemuan *East Asian Summit* 13 November 2014 di Myanmar telah mendorong ide konektivitas antar pulau melalui pembangunan infrastruktur dan perlindungan sumber daya maritim untuk mendukung perekonomian Indonesia. Berdasarkan Kebijakan Kelautan Indonesia 2017, Poros Maritim Dunia adalah: “suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional” (Kemenko Bidang Kemaritiman RI, 2017). Visi PMD juga mengarahkan Indonesia untuk memiliki kapabilitas pertahanan maritim untuk menciptakan kekuatan maritim kawasan yang dapat melindungi kedaulatan dan kemakmuran, serta keselamatan jalur pelayaran, keamanan maritim dan diplomasi maritim (Marzuki, 2018). Bahkan terkait dengan lingkungan internasional, visi PMD dapat menjadi kebijakan Indonesia yang tepat dalam menanggapi kompetisi geopolitik serta dinamika ancaman yang ada (Perwita, 2020).

Sejak Visi PMD dicanangkan, pemerintah mulai mengeluarkan berbagai kebijakan yang terkait dengan aspek maritim. Perpres No. 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia serta Kepmenkes No. 128/2019 tentang Buku Putih Diplomasi Maritim merupakan contoh kebijakan yang diturunkan dari visi tersebut. Tindak lanjut dari visi PMD juga dilakukan pemerintah melalui pendirian Kementerian Koordinator Bidang Maritim mencakup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. Selain itu diterbitkan pula Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia: Menuju Poros Maritim Dunia tahun 2017 (Pusat P2K-OI Kemlu dan CSIS, 2017). Terdapat lima pilar yang menjadi bagian dari visi PMD yang kemudian berubah menjadi tujuh pilar seperti tertuang pada Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditetapkan pada 2017. Kelima pilar dalam visi PMD adalah: budaya maritim yang berkaitan dengan cara pandang dan jati diri bangsa, ekonomi maritim yang berkaitan dengan kedaulatan pangan dan pengembangan industri, infrastruktur maritim yang berkenaan dengan pembangunan konektivitas wilayah di Indonesia, diplomasi maritim yang berkaitan dengan tata laksana hubungan luar negeri yang berbasis kerjasama, dan pertahanan maritim yang berkaitan

dengan pembangunan kekuatan maritim dalam rangka menjaga kedaulatan, sumber daya, keselamatan dan keamanan di wilayah laut Indonesia (Pusat P2K-OI Kemlu dan CSIS, 2017).

Kelima pilar visi PMD kemudian dikembangkan menjadi tujuh pilar dalam Kebijakan Kelautan Indonesia 2017 yang mencakup: 1) pengelolaan sumber daya kelautan dan sumber daya manusia, 2) pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut, 3) tata kelola dan kelembagaan laut, 4) ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan, 5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, 6) budaya bahari, dan 7) diplomasi maritim (Kemenko Bidang Kemaritiman RI, 2017).

Seluruh pilar sebagai penopang visi PMD tersebut terlihat berorientasi *inward looking* dan *outward looking*. Misalnya, pilar pertama yaitu budaya maritim yang merupakan pilar yang berorientasi ke dalam negeri atau kepada bangsa Indonesia (*inward looking*) karena pilar ini berkaitan dengan cara pandang dan jati diri bangsa. Sedangkan pilar diplomasi maritim merupakan pilar yang cenderung berorientasi kepada aspek yang berada di luar Indonesia atau dikenal *outward looking* karena terkait dengan kerjasama internasional. Pilar-pilar penunjang visi PMD merupakan pilar yang penting namun pengembangan pilar-pilar ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya, pilar budaya maritim yang *inward looking* kurang dioperasionalisasikan dengan konsep diplomasi maritim yang *forward looking*. Bahkan, upaya pencapaian visi PMD ini mulai menurun pada masa pemerintahan kedua Jokowi padahal visi ini semestinya diperjuangkan secara berkelanjutan dalam periode waktu yang panjang (Agastia, 2021).

Salah satu penyebab penurunan upaya pencapaian PMD ini adalah minimnya pengalaman Presiden Jokowi dalam hal perumusan kebijakan luar negeri terkait maritim sehingga pendekatan yang dilakukan terkesan 'lepas tangan' terhadap visi PMD. Selain itu, kebijakan utama PMD terhambat karena adanya keputusan-keputusan *ad-hoc* akibat cara pandang teknokratis. Dalam tiga isu area penerapan visi PMD yaitu perumusan kebijakan maritim, pengembangan infrastruktur dan diplomasi, pemerintah terlihat menerapkan visi PMD secara tidak terarah dan cenderung menghindari keterlibatan pada area tersebut (Agastia, 2021). Selain itu, faktor birokrasi, kurangnya budget untuk modernisasi kapabilitas angkatan laut dan juga udara dapat menjadi faktor kendala bagi penerapan visi PMD (Gindarsah and Priamarizki, 2021). Visi PMD juga masih dipandang sebagai gagasan yang sifatnya terlalu umum dan abstrak untuk menjadi landasan kebijakan strategis. Unsur dimensi eksternal dari doktrin tersebut masih belum kuat dimana masih ditekankan penggunaan

instrumen-instrumen damai dan tidak mengarah kepada pembangunan sistem manajemen krisis (Laksmana, Gindarsah and Mantong, 2018).

Meskipun kebijakan Kelautan Indonesia 2017 menyatakan bahwa pilar-pilar visi PMD saling terkait, namun masih belum ada pembahasan literatur yang fokus membahas keterkaitan antar pilar. Padahal, kajian antar pilar dapat mempermudah pemahaman terhadap visi PMD sebagai suatu bangunan gagasan yang utuh. Literatur pada penelitian terdahulu juga sifatnya terbatas pada pembahasan terhadap studi kasus tertentu, lingkungan tertentu atau konteks tertentu. Contoh penelitian terdahulu mengenai budaya maritim adalah penelitian untuk mengetahui pemahaman budaya maritim masyarakat di Pantai Depok, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa budaya maritim masyarakat Pantai Depok masih dipengaruhi oleh pola pikir agraris sehingga identitas mereka sebagai petani-nelayan (Chairunnisa, Rijanta and Baiquni, 2019). Contoh penelitian terdahulu mengenai diplomasi maritim adalah penelitian mengetahui analisa sejauh mana diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan dalam bingkai visi PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam dari tujuh prioritas diplomasi maritim telah terlaksana sepanjang periode 2014-2019 (Hadiningrat, 2020). Penelitian-penelitian terdahulu tidak berupaya mengaitkan pilar-pilar visi PMD yang ada padahal kajian budaya maritim dengan diplomasi maritim secara konseptual perlu juga dilakukan.

Tulisan ini berupaya melihat keterkaitan dua pilar yaitu pilar budaya maritim yang menjadi landasan bangsa maritim dengan pilar diplomasi maritim yang dapat menjadi alat bagi pencapaian kepentingan nasional yang dimiliki bangsa maritim. Dengan memahami keterkaitan kedua pilar ini maka implementasi kebijakan pada salah satu pilar yaitu budaya maritim akan dilengkapi oleh kebijakan pilar lainnya yaitu diplomasi maritim, atau sebaliknya. Strategi atau kebijakan yang terkait dengan kedua pilar ini tentu akan mempercepat proses pencapaian visi PMD. Dalam menjelaskan keterkaitan simpul budaya maritim dengan diplomasi maritim Indonesia, tulisan ini mengacu kepada dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana budaya maritim dapat mempengaruhi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia? bagaimana implikasi positif penerapan budaya maritim terhadap diplomasi maritim Indonesia?

Untuk menguraikan penjelasan terkait kedua pertanyaan tersebut, tulisan ini terbagi menjadi lima bagian. Bagian pertama menguraikan pilar pertama visi PMD yaitu budaya maritim dan pilar kelima visi PMD yaitu diplomasi maritim. Dalam bagian ini diuraikan pula dimensi kepentingan nasional yang terkandung dalam pilar budaya maritim dan pilar diplomasi

maritim. Bagian kedua menjelaskan bagaimana simpul budaya maritim berpengaruh terhadap strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia. Bagian ketiga menjelaskan implikasi positif penerapan budaya maritim terhadap diplomasi maritim Indonesia. Bagian akhir merupakan bagian penutup sekaligus menjelaskan beberapa rekomendasi kebijakan luar negeri yang terkait dengan budaya maritim.

Pilar budaya maritim dan pilar diplomasi maritim dalam visi Poros Maritim Dunia

Kata 'maritim dan 'bahari' seringkali dianggap mengacu kepada makna yang sama namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kata maritim mengacu kepada aktivitas terkait laut yaitu urusan perdagangan (pelayaran) dan kegiatan lainnya yang dilakukan di atas laut dimana laut adalah sebagai sarana atau objek atau tempat kegiatan. Sedangkan, bahari cenderung diasumsikan sebagai manusia atau orang yang melakukan kegiatan kemaritiman di atas laut atau sekitarnya. Seringkali bahari dikaitkan dengan kebudayaan masa lalu yang mengarah kepada orang, masa lampau, dan masa dahulu kala (Purnomo, 2020).

Berdasarkan perspektif pertahanan negara, budaya maritim merupakan dasar dalam pembentukan elemen-elemen pertahanan maritim di Indonesia. Pertahanan maritim yang kuat ditentukan oleh budaya maritim yang kuat (Wiranto, 2020). Sementara budaya dalam perspektif sosiologi, dapat dipahami sebagai kebiasaan yang berlangsung selama beberapa tahun yang melekat dalam suatu struktur sosial masyarakat. Budaya dapat lahir karena adanya pola hubungan terus menerus antara manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungannya. Tumbuh, kembang dan runtuhnya budaya maritim Indonesia seringkali juga dikaitkan dengan budaya daratan. Salah satu contoh adalah pada masa Kerajaan Banten, aktivitas melaut merupakan aktivitas utama masyarakat sehingga keberadaan laut dan pelabuhan merupakan sarana efektif bagi kegiatan melaut. Namun, keberadaan laut dan pelabuhan juga memberikan sarana efektif bagi lalu lintas komoditas perkebunan Banten terutama pala, lada dan kelapa (Octavian dan Yulianto, 2014).

Budaya maritim seringkali dipandang sebagai suatu simpul atau ikatan yang terdiri dari berbagai komponen. Salah satu komponen utama pembentuk budaya maritim adalah kondisi alam maritim. Berdasarkan kondisi alamiah, kehidupan di laut dianggap manusia sebagai kehidupan yang penuh dengan tantangan dibandingkan kehidupan yang ada di darat. Oleh karena adanya tantangan ini maka terbentuklah karakter individu tertentu. Karakter individu yang berorientasi maritim harus mampu

menghadapi tantangan kehidupan di laut yang sangat berbeda dengan kehidupan di darat. Kondisi alam di laut yang begitu fluktuatif dan cenderung tidak bersahabat mengarahkan manusia untuk memiliki orientasi hidup atau karakter tertentu. Simpul budaya maritim dibentuk oleh karakter manusia yang mengutamakan pola pikir dan pola kerja berdasarkan keberanian, percaya diri, kerja keras yang dilandasi oleh kecerdasan dan kebersamaan (Purnomo, 2020).

Budaya maritim juga memungkinkan masyarakat memiliki sikap ulet, kerja keras, wirausaha (*entrepreneurship*), gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Simpul budaya maritim menjadikan laut sebagai ruang dengan banyak fungsi yaitu ruang hidup, ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolahraga dan berkreasi dan ruang mendidik masyarakat. Oleh karena laut memiliki ruang fungsi yang luas dan menentukan budaya maritim, maka dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, Pemerintah menetapkan program strategi kebijakan budaya maritim yaitu: meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan, mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah NKRI, membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari, melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari, dan mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan peran kota-kota pelabuhan bersejarah (Kemenko Bidang Kemaritiman RI, 2017).

Pengelolaan potensi kelautan yang kita miliki terkait pula dengan hubungan Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam pilar diplomasi maritim. Definisi diplomasi maritim yang tercantum dalam Kebijakan Kelautan 2017 didefinisikan sebagai berikut: "...pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.." (Kemenko Bidang Kemaritiman RI, 2017). Program-program utama untuk melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim adalah: peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral regional, dan multilateral; peningkatan peran aktor dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan; kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan; percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga; percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional; peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan pembakuan nama pulau (Kemenko Bidang Kemaritiman RI,

2017). Sebagai salah satu pilar pencapaian visi PMD, diplomasi maritim Indonesia telah berhasil menyepakati perjanjian batas maritim Indonesia dengan negara-negara tertentu terkait garis batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen (Kusumawardhani and Arie Afriansyah, 2019). Dengan adanya visi PMD, diplomasi maritim semakin mengarah kepada percepatan proses penyelesaian masalah perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Visi PMD berhasil menjadi strategi diplomasi maritim bukan saja di tingkat nasional, bilateral, atau regional tetapi juga di tingkat global. Visi PMD juga dapat berfungsi sebagai strategi Indonesia selaku *middle power* dalam menghadapi rivalitas global geopolitik negara besar atau dinamika tatanan internasional. Dalam menghadapi *Belt and Road initiatives* (BRI) maupun *Free-Open Indo Pacific* (FOIP), Indonesia menggunakan visi PMD guna meningkatkan *prestige*, *role* (peran) dan *influence* (pengaruh) dalam tatanan regional dan internasional. Indonesia menggunakan visi PMD dalam menanggapi BRI melalui maksimalisasi sumber dayanya dan implementasi *niche diplomacy* yaitu diplomasi yang fokus terhadap isu spesifik. Misalnya fokus diplomasi dengan China adalah pada upaya pengembangan infrastruktur untuk konektivitas laut Indonesia (Pratiwi et al, 2021).

Praktek budaya maritim dan praktek diplomasi maritim menggunakan instrumen yang berbeda. Budaya maritim dipraktekkan melalui sekumpulan nilai yang dianut, cara pandang, sikap, tingkah laku, karakteristik, kebiasaan, gaya hidup yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat/bangsa/aktor non-negara. Sedangkan, diplomasi maritim dipraktekkan melalui cara negosiasi, publikasi, forum interaksi resmi baik antar aktor pemerintah/negara atau melibatkan interaksi dengan aktor non-negara. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, budaya maritim dan diplomasi maritim saling terkait karena keduanya dapat terbentuk atau terlaksana karena didasari oleh kepentingan nasional. Pilar budaya maritim dan pilar diplomasi maritim merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional, bukan untuk mengejar tujuan sekelompok masyarakat tertentu saja. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Baik budaya maritim maupun diplomasi maritim juga mengandung unsur sikap bela negara dan perwujudan dari rasa nasionalisme. Budaya maritim ditumbuhkembangkan di lingkungan internal atau kepada warga negara Indonesia sedangkan diplomasi maritim ditujukan ke arah pencapaian kepentingan nasional yang berada di lingkungan eksternal. Budaya maritim dan diplomasi maritim memiliki persamaan yaitu berperan sebagai pilar-pilar pendukung terwujudnya visi PMD. Keduanya dipraktekkan untuk tujuan menciptakan rasa aman melalui jalan damai demi kepentingan nasional dan keamanan di wilayah maritim. Dengan adanya kesadaran budaya maritim, bangsa Indonesia memiliki sikap dan jati diri yang tangguh dalam pengelolaan sumber daya maritim yang luas dan berlimpah untuk seluruh masyarakat termasuk masyarakat di daerah pesisir. Kesadaran budaya maritim ini juga merupakan modal bagi tugas dan tanggungjawab penjagaan dan pengamanan perairan serta pulau-pulau terdepan yang bukan saja merupakan kewajiban TNI tetapi juga seluruh warga negara seperti tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara" (Madjid, 2018).

Mengembangkan budaya maritim bagi bangsa Indonesia yang kaya dengan potensi maritimnya, sesungguhnya merupakan upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang dilandasi oleh semangat, cinta tanah air, dan kesadaran untuk bela negara dalam menghadapi berbagai ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri yang dapat mengancam kedaulatan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara (Salim, 2021). Demikian pula dengan upaya meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia. Upaya ini juga termasuk ke dalam upaya bela negara walaupun pengejaran kepentingan nasional dilakukan di lingkungan eksternal atau melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal. Diplomasi maritim perlu didasari oleh nilai-nilai budaya maritim sebab kelancaran diplomasi juga ditentukan oleh beberapa hal. Bentuk diplomasi sangat tergantung dengan pejabat pemerintah yang menjalankannya, kepentingan atau sektor pemerintahan apa yang diperjuangkan dalam forum tersebut serta cara atau jenis komunikasi apa yang digunakan. Diplomasi memerlukan tata cara khusus serta kompetensi dari para pelaksananya (Anwar, 2014). Dengan demikian, para perumus dan pelaksana diplomasi maritim memerlukan kesadaran budaya maritim sehingga dapat mengkomunikasikan secara akurat nilai-nilai budaya maritim serta kepentingan nasional yang sesuai dengan Visi PMD. Simpul budaya maritim dapat mempengaruhi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia karena budaya dapat menjadi

akar bagi diplomasi. Budaya maritim dapat menjadi dasar pengetahuan, landasan bersikap, kerangka berpikir untuk melaksanakan interaksi resmi antar aktor pemerintah/negara maupun aktor non-negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk menciptakan keamanan maritim.

Pengaruh budaya maritim terhadap diplomasi maritim dari perspektif hubungan internasional

Untuk mengidentifikasi pengaruh budaya maritim terhadap diplomasi maritim, maka tulisan ini menggunakan perspektif dari tiga teori utama dalam HI: Realisme dan Neorealisme, Liberalisme dan Neoliberalisme serta Konstruktivisme. Ketiga perspektif ini digunakan sebagai penghubung yang menjelaskan keterkaitan antara budaya dan diplomasi karena unsur budaya dan unsur diplomasi tercakup dalam perspektif HI.

Realisme memiliki asumsi bahwa negara dan kebijakan luar negeri merupakan unit analisis dalam sistem internasional. Salah satu tokoh Realisme yaitu Hans J. Morgenthau memiliki asumsi bahwa tindakan aktor negara dipengaruhi oleh *power*. Beberapa tokoh Realisme termasuk misalnya Hans J. Morgenthau, memiliki asumsi bahwa perubahan sistem internasional dapat terjadi karena perubahan norma internasional, aturan dan nilai yang sejalan dengan kepentingan nasional para negara hegemon. Sementara Neo-Realis memiliki asumsi bahwa tindakan aktor lebih ditentukan oleh adanya dorongan dari struktur atau sistem internasional. Dalam kerjasama yang terjalin antara negara-negara hegemon, kaum Neo-Realis percaya bahwa kepentingan negara-negara hegemon dalam sistem dapat memberikan pengaruh kepada negara lain yang berada di dalam sistem (Dugis, 2016).

Berseberangan dengan Realisme, perspektif Konstruktivisme yang dikemukakan diantaranya oleh Alexander Wendt, meyakini bahwa hubungan internasional merupakan hubungan sosial bukanlah hubungan yang bersifat material melainkan *ideational*. Dalam proses *communicative action* yang dilakukan para aktor hubungan internasional akan tercipta *intersubjective understanding* antara aktor-aktor yang ada misalnya antara aktor yang terlibat dalam suatu kerjasama pertahanan antara dua negara. Dengan demikian, tindakan (*behavior*) negara lain bukanlah menjadi penentu struktur internasional, tetapi identitas aktor dan kepentingan nasional negara itulah yang menentukan struktur internasional dan juga mempengaruhi tindakan aktor negara.

Paradigma Liberalisme yang berakar dari paradigma Idealis merupakan kontrak dari Realisme. Berbeda dengan Realis, Liberalisme

tidak beranggapan bahwa distribusi *power* menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Liberalisme beranggapan bahwa kondisi sistem internasional justru ditentukan oleh norma yang diadopsi oleh negara untuk menjunjung hukum internasional dan nilai yang berlaku di dalam tingkat domestik suatu negara. Norma ini dapat terwujud dalam tata aturan misalnya kerjasama antar negara baik secara bilateral, regional atau multilateral dalam pembangunan area maritim. Penegakan hukum internasional yang didasari oleh pemikiran kaum Liberalis, diadopsi pula oleh Neo-Liberal (Dugis, 2016). Salah satu teori Liberal yang menunjukkan kekuatan norma yang dianut dapat menentukan sistem internasional secara keseluruhan yaitu *Democratic Peace Theory*. Teori yang dirumuskan oleh Immanuel Kant ini menyatakan bahwa negara yang memiliki nilai dan norma demokrasi tidak akan berperang dengan negara demokrasi lainnya. Dengan kondisi seperti ini tentu tatanan dunia demokratis dianggap dapat terwujud oleh negara (Shah, 2021).

Terdapat setidaknya tiga nilai dalam simpul budaya maritim yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan diplomasi maritim dalam tahap input, proses, *output* dan juga *outcome*. Dengan memahami tiga perspektif utama yang berbeda dalam melihat tindakan suatu negara maka kita dapat memahami bahwa setidaknya ada tiga cara pandang utama yang dapat membantu kita memahami bagaimana komponen-komponen yang membentuk simpul budaya maritim dapat berkaitan dengan diplomasi maritim suatu negara.

Pertama, nilai budaya maritim yang mencerminkan karakter dan sikap pantang menyerah serta gigih, ulet dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tengah dinamika struktur dalam internasional yang dinamis. Dalam menghadapi tantangan kehidupan alam di laut yang tidak statis melainkan dinamis misalnya karena perubahan cuaca yang berubah-ubah maka kekuatan karakter yang fleksibel dan sanggup menghadapi perubahan merupakan faktor penting. Karakter maritim ini dapat menjadi modal pelaksanaan diplomasi maritim. Diplomasi merupakan tindakan yang dinamis yang tidak memiliki rumus yang baku untuk diikuti sehingga fleksibilitas strategi dan pelaksanaan diplomasi cukup lebar. Diplomasi merupakan suatu seni namun tetap perlu didukung oleh kekuatan mental dan fisik para pelaku diplomasi melalui sikap kegigihan dan keuletan menghadapi mitra diplomasi dalam menyelesaikan isu-isu maritim.

Kedua, nilai budaya maritim terkait dengan penciptaan dan pengembangan identitas bangsa. Identitas sebagai negara maritim serta bangsa yang cinta akan maritim dapat ditunjukkan diantaranya melalui orientasi pengelolaan sumber daya maritim dengan baik. Konstruksi sosial

yang terus berlangsung pada akhirnya dapat menciptakan identitas budaya maritim Indonesia. Identitas ini akan meningkatkan nasionalisme, menegaskan persamaan antar kelompok masyarakat di tingkat nasional (membentuk identitas bersama yaitu '*Self*') serta menegaskan perbedaan identitas bangsa tersebut dengan bangsa lain ('*Others*').

Ketiga, nilai budaya maritim yang terkait dengan mengutamakan norma kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku yaitu hukum. Budaya maritim yang mengutamakan kebersamaan dan kerjasama memerlukan tata aturan dalam berinteraksi agar kepentingan bersama tersebut dapat tercapai. Karakteristik budaya maritim bertentangan dengan sikap semaunya sendiri atau tanpa aturan. Dengan demikian, nilai budaya maritim dapat menjadi landasan bagi diplomasi maritim dalam hal mendorong pemberlakuan norma, tata aturan bahkan rezim kelautan. Nilai budaya maritim ini dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan diplomasi maritim. Misalnya, diplomasi terkait pengaturan wilayah yurisdiksi laut suatu negara berdasarkan aturan yang adil dan dipatuhi pihak-pihak yang terkait.

Ketiga budaya maritim tersebut berpotensi memberikan pengaruh bagi diplomasi maritim dalam wujud sebagai akar atau landasan perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi. Budaya yang dianut oleh perumus strategi dan pelaksana diplomasi akan mempengaruhi kebijakan yang dihasilkannya. Selain itu, tingkat keberhasilan kebijakan yang diterapkan suatu lingkungan akan sangat ditentukan oleh budaya yang berlaku pada lingkungan tersebut.

Implikasi positif penerapan budaya maritim terhadap diplomasi maritim Indonesia

Dengan adanya kesamaan praktek budaya maritim dan diplomasi maritim dalam mencapai kepentingan nasional maka budaya maritim tentu dapat diterapkan pada setiap elemen yang terdapat dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Adanya kesesuaian nilai-nilai dalam simpul budaya maritim dengan diplomasi maritim melahirkan potensi implikasi positif bagi diplomasi maritim terhadap input, proses, *output* dan *outcome* diplomasi Indonesia. Tentu saja, budaya maritim dapat berimplikasi positif bagi diplomasi maritim apabila budaya maritim suatu negara dapat dikelola oleh aktor negara (pemerintah) dan aktor non-negara dengan baik.

Budaya maritim dapat memberikan implikasi positif terhadap diplomasi maritim berdasarkan tiga perspektif berikut: implikasi pertama dapat diuraikan berdasarkan perspektif *power*. Budaya maritim dapat digunakan sebagai instrumen dalam berdiplomasi. Budaya sebagai instrumen *soft power* dapat digunakan untuk mempengaruhi mitra

diplomasi. Bahkan, sebagai *instrument*, budaya maritim dapat dipadukan dengan *hard power* sehingga dapat berperan sebagai *instrument smart power diplomacy*. Budaya maritim yang ditandai sikap mengutamakan pengelolaan kekuatan maritim dapat menjadi landasan yang kuat untuk mengejar tujuan keamanan maritim baik dalam kondisi konflik maupun damai. Budaya maritim dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan negara khususnya kedaulatan laut. Pembinaan budaya maritim pun dapat menjadi alat untuk membangun hubungan baik dengan negara mitra. Salah satu contoh pemeliharaan budaya maritim yang terkait dengan diplomasi adalah pelaksanaan kerjasama *sister city* di bidang pariwisata antara kota Ambon dan kota Darwin. Kedua kota ini telah beberapa kali berhasil menyelenggarakan *yacht race* yang dilaksanakan secara rutin. Pelaksanaan *race* ini dimulai di Darwin sebagai garis *start* dan Ambon sebagai garis *finish*. Kegiatan ini tidak sekedar menarik wisatawan asing khususnya Australia tetapi membina hubungan yang baik antara aktor non negara di kedua negara.

Dengan dimilikinya pemahaman dan pengembangan gagasan akan potensi maritim melalui pengembangan nilai-nilai budaya maritim masyarakat Indonesia maka dinamika sengketa maritim di kawasan dapat dicegah. Karakteristik budaya maritim bersifat *non-coercive* (tanpa kekerasan) sehingga dapat digunakan untuk mencegah terjadi peperangan dengan menjadi landasan diplomasi maritim. Selain itu karakteristik nilai budaya maritim yang tidak mudah menyerah, juga dapat menjadi pendorong penyelesaian konflik agar dilakukan secara damai serta mencegahnya menjadi perang terbuka. Dalam kondisi konflik, nilai budaya maritim dapat digunakan sebagai solusi bagi penyelesaian konflik maritim. Karakteristik budaya maritim yang memungkinkan ketegasan dan keberanian dalam penyelesaian masalah konflik perlu diterapkan oleh para aktor diplomasi maritim yang terlibat sengketa dan konflik.

Dalam kondisi damai, budaya maritim dapat menjadi penentu bagi identifikasi ancaman tradisional dan non-tradisional bagi keamanan dan pertahanan maritim. Pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai batasan wilayah maritim, pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dapat membantu upaya identifikasi apa yang tergolong sebagai ancaman (*threat*) atau sekuritisasi. Identifikasi persepsi ancaman akan muncul apabila nilai budaya maritim dimiliki. Dalam kondisi damai, budaya maritim juga dirasakan penting untuk dimiliki, dikembangkan dan dikelola untuk kepentingan diplomasi maritim. Budaya maritim dapat digunakan sebagai alat propaganda, pemberi pengaruh dalam diplomasi publik terkait maritim kepada pihak lain. Sifat dan karakteristik penganut budaya maritim yang cenderung pantang menyerah dan berani menghadapi segala

tantangan menjadi pendorong bagi pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia.

Kedua, berdasarkan perspektif Konstruktivis, budaya maritim dapat menjadi faktor pembentuk identitas nasional kita sebagai bangsa maritim. Identitas budaya yang jelas terpancar dapat menunjukkan juga orientasi nasional Indonesia di tingkat internasional dengan tegas. Identitas ini tentu tidak saja terlihat dalam wujud material saja tetapi juga non-material. Identitas ini pun dapat membentuk rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Budaya maritim dapat mengarah kepada rekayasa politik berupa re-imajinasi tentang identitas bangsa maritim yang memiliki kedaulatan di laut. Perwujudan nasionalisme maritim ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang maju kuat dan memiliki posisi tawar (*bargaining*) sebagai bangsa maritim (Paskarina, 2016).

Dengan tergambarkannya identitas nasional kita sebagai bangsa dan negara maritim maka strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim dengan negara-negara mitra dapat terhindar dari prasangka atau salah persepsi. Berbeda apabila identitas kita tidak menggambarkan secara jelas, maka akan terjadi prasangka atas sikap atau kesalahan persepsi dalam bertindak pada langkah diplomasi. Sebagai negara dengan identitas maritim tentu terlihat bahwa Indonesia sangat mengutamakan penciptaan keamanan maritim. Identitas maritim dapat terlihat dalam keamanan nasional, lingkungan kelautan, pembangunan ekonomi dan keamanan individu (Bueger and Edmunds, 2017).

Indonesia akan dengan mudah berhubungan dengan negara-negara tetangga serta negara besar yang memiliki identitas serupa yaitu berorientasi maritim. Kemudahan ini dapat terjadi karena adanya saling memahami (*intersubjective understanding*) di antara negara-negara yang memiliki karakter yang sama. Budaya maritim yang melekat pada para pelaku diplomasi maritim, dapat memudahkan aktualisasi perumusan tujuan dan pelaksanaan diplomasi. Para diplomat yang berada pada *first track* maupun *second track diplomacy*, perlu memiliki visi yang sama mengenai identitas mereka agar dapat memudahkan mereka mengaktualisasikan strategi serta tindakan yang sesuai dengan kepentingan nasional dalam bidang maritim.

Ketiga, berdasarkan perspektif Liberalis, budaya maritim dapat menjadi pendorong penciptaan norma atau aturan bersama yang mengarah kepada bentuk kerjasama. Bahkan lebih lanjut, norma tata kelola kerjasama ini dapat berpotensi mengarah kepada pembentukan rezim hingga penciptaan perdamaian. Dengan melekatnya nilai-nilai budaya maritim pada *first* maupun *second track diplomacy* maka dapat menjadi pendorong terciptanya norma-norma pada aspek maritim. Budaya maritim berupa

karakteristik, nilai-nilai dan cara pandang di antara masyarakat mampu memunculkan konektivitas, kesepahaman, antara investor, masyarakat pesisir, pemerintah dan berbagai pihak lainnya yang memudahkan terjadinya interaksi bahkan kerjasama. Apabila kerjasama dapat terbina dengan baik maka pada akhirnya dapat menciptakan rezim kelautan yang kokoh.

Beberapa implikasi positif dari nilai budaya maritim terhadap perumusan strategi kebijakan luar negeri dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan pentingnya ide atau gagasan mengenai Indonesia sebagai negara maritim. Visi PMD merupakan gagasan awal yang telah lahir dari pemerintah dan perlu didukung dengan konstruksi pembentukan budaya maritim. Konstruksi tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan yang disosialisasikan pemerintah secara *top to bottom* atau bahkan melalui nilai-nilai budaya maritim yang terjaga dan berkembang di antara masyarakat Indonesia. Untuk memperkokoh sumber daya maritim yang kita miliki maka nilai-nilai budaya maritim dapat menjadi nilai-nilai yang mendasari diplomasi maritim Indonesia khususnya dalam menjalin kerjasama kemaritiman dengan negara mitra.

Kesimpulan

Simpul budaya maritim yang mengikat berbagai nilai, cara pandang dan karakteristik yang berlandaskan kondisi maritim, memiliki keterkaitan yang erat dengan diplomasi maritim. Keterkaitan ini muncul karena keduanya merupakan pilar bagi perwujudan visi PMD. Sebagai pilar bagi visi PMD, baik budaya maritim maupun diplomasi maritim merupakan cerminan dan sasaran untuk pencapaian kepentingan nasional dalam aspek maritim. Budaya maritim memberikan implikasi positif kepada diplomasi maritim dalam tiga hal. Pertama, budaya maritim dapat menjadi instrumen *soft power* yang merupakan pilihan strategis dalam melakukan diplomasi maritim. Kedua, budaya maritim dapat menjadi pembentuk identitas nasional sehingga dapat memancarkan orientasi kemaritiman Indonesia dengan tegas. Ketiga, budaya maritim dapat menjadi pendorong terlahir dan terbinanya norma tata kelola kerjasama keamanan kawasan dalam aspek maritim. Ketiga implikasi positif ini tentu menjadi *facilitating factors* bagi perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia.

Dengan adanya keterkaitan antara budaya maritim dengan diplomasi maritim serta implikasi positif yang muncul, maka penulis menyatakan pentingnya kedua pilar ini untuk dikembangkan secara bersamaan dalam suatu kebijakan. Langkah pengembangan budaya maritim yang dapat dilakukan diantaranya melalui pendidikan dan

pengajaran baik formal dan non-normal mengenai kemaritiman. Pengkajian ini dapat ditujukan kepada anak usia sekolah dasar hingga para diplomat serta perumus dan pelaksana diplomasi di jalur non pemerintah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan nasional terkait pengayaan materi atau diseminasi informasi dan pengetahuan mengenai budaya maritim dan diplomasi maritim kepada publik melalui teknologi digital yang mudah dan menarik bagi generasi muda. Kesadaran mengenai kemaritiman ini akan menumbuhkan bibit budaya maritim yang apabila dikelola dan dikembangkan dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pencapaian kepentingan nasional dalam diplomasi maritim. Pilar budaya maritim dengan diplomasi maritim yang erat memungkinkan tercapainya visi PMD yang dicita-citakan. Budaya maritim yang dikelola secara terarah akan menjadi modal bagi diplomasi maritim dalam wujud instrumen *soft power*, pembentuk identitas nasional yang kuat serta pendorong norma tata kelola keamanan kawasan. Pilar budaya maritim merupakan akar bagi diplomasi maritim untuk mencapai kepentingan nasional.

Daftar pustaka

- Agastia, I.G.B.D. (2021). Joko Widodo's fleeting maritime ambitions: an actor-specific analysis of indonesia's global maritime fulcrum. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 8 (3), pp. 304-23.
- Anwar, S. (2014). Peran diplomasi pertahanan dalam mengatasi tantangan di bidang pertahanan. *Jurnal Pertahanan Agustus*, 4 (2), pp. 71-93.
- Bueger, C., and Edmunds, T. (2017). Beyond sea blindness: a new agenda for maritime security studies. *International Affairs*, 93 (6), pp. 1293-1311.
- Chairunnisa, I., Rijanta, R., and Baiquni, M. (2019). Pemahaman budaya maritim masyarakat Pantai Depok Kabupaten Bantul. *Media Komunikasi Geografi*, 20 (2), pp. 199-210.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Gindarsah, I., and Priamarizki, A. (2021). Explaining Indonesia's under-balancing: the case of the modernisation of the air force and the navy. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 8 (3), pp. 391-412.
- Hadiningrat, J.K. (2020). Diplomasi maritim: meletakkan fondasi poros maritim dunia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8 (1), pp. 98-109.
- Kemenko Bidang Kemaritiman RI. (2017). Kebijakan Kelautan Indonesia [online]. Tersedia di: <<https://jdih.maritim.go.id/en/kebijakan-kelautan-indonesia>> (diakses 26 November 2022).
- Kusumawardhani, I., and Afriansyah, A. (2019). Kebijakan kelautan Indonesia dan diplomasi maritim. *Kertha Patrika*, 41 (3), pp. 251-282.

- Laksmana, E., Gindarsih, I., and Mantong, A. (2018). *Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi*. Jakarta: CSIS.
- Madjid, A. (2018). Membangun kesadaran masyarakat maritim dalam perspektif bela negara. *WiRa Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 74 (58), pp. 6-11.
- Marzuki, K.I. (2018). The meaning of Indonesia's global maritime fulcrum. *Pacific Forum*, 14 A(February), pp. 1-2.
- Paskarina, C. (2016). Wacana negara maritim dan reimajinasi nasionalisme Indonesia. *Jurnal Wacana Publik Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, 1 (1), pp. 1-8.
- Perwita, A.A.B. (2020). *Visi 'Poros Maritim Dunia' Joko Widodo : Respons Terhadap Dinamika Kawasan Indo- Pasifik*. Jakarta: Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat President University.
- Pratiwi, F.I., Puspitasari, I., Hikmawati, I., and Bagus, H. (2021). Global maritime fulcrum: Indonesia's middle power strategy between Belt And Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, 15 (3), pp. 30-54.
- Purnomo, N.H. (2020). *Membangun Karakter Berorientasi Kemaritiman*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Pusat P2K-OI Kemlu dan CSIS. (2017). *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, Dan Prospek*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kemlu RI.
- Salim, A. (2021). Pengaruh kesadaran budaya maritim masyarakat terhadap semangat bela negara. *Jurnal Maritim Indonesia*, 9 (3), pp. 263-80.
- Shah, M.A. (2021). Theories of international relations: role of values and power. *The IUP Journal of International Relations*, 15 (2), pp. 7-20.
- Wiranto, S. (2020). Membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui kebijakan kelautan Indonesia dengan strategi pertahanan maritim Indonesia: perspektif pertahanan maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 8 (2), pp. 110-26.